

## PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI WEBINAR: ANALISIS PEMADANAN NIK-NPWP DAN PERHITUNGAN PPH 21 TERBARU

Weddie Andriyanto<sup>1</sup>, Neny Desriani<sup>2</sup>, Kamadie Sumanda Syafis<sup>3</sup>, Ayu Dwinny Octary<sup>4</sup>, Aryan Danil Mirza. BR<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia  
Weddie.andriyanto@feb.unila.ac.id<sup>1</sup>, neny.desriani@feb.unila.ac.id<sup>2</sup>, kamadie.sumanda@feb.unila.ac.id<sup>3</sup>,  
ayu.dwinny@feb.unila.ac.id<sup>4</sup>, aryan.danil@feb.unila.ac.id<sup>5</sup>

Dikumpulkan: 11 Januari 2024; Diterima: 27 Januari 2024; Terbit/Dicetak: 31 Januari 2024;  
<https://doi.org/10.23960/begawi.v2i1.37>

**Abstract :** *Community service activities with the theme of matching NIK-NPWP and calculating the Latest Income Tax 21 (PPH 21), are initiatives to increase tax compliance among the community. The resource persons came from the Bengkulu and Lampung DJP Regional Offices. This activity provides in-depth insight into the concept of matching NIK-NPWP and the latest PPH 21 calculations. Through the Zoom Meeting platform, this activity provides E-Certificates as a form of appreciation and an effort to increase understanding of taxation. There were 202 participants who attended this event from various institutions and regions, consisting of lecturers, staff, students and the general public. Overall, this webinar successfully completed the clean-up of the early year tax updates, equipping participants with the knowledge and concrete steps to adapt to the new policies*

Copyright © 2024, **BEGAWI**: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

**Keywords:** Pajak, Pengabdian Masyarakat, Pemadanan NIK-NPWP, PPH 21, Kepatuhan Pajak

**\*Corresponding author:**

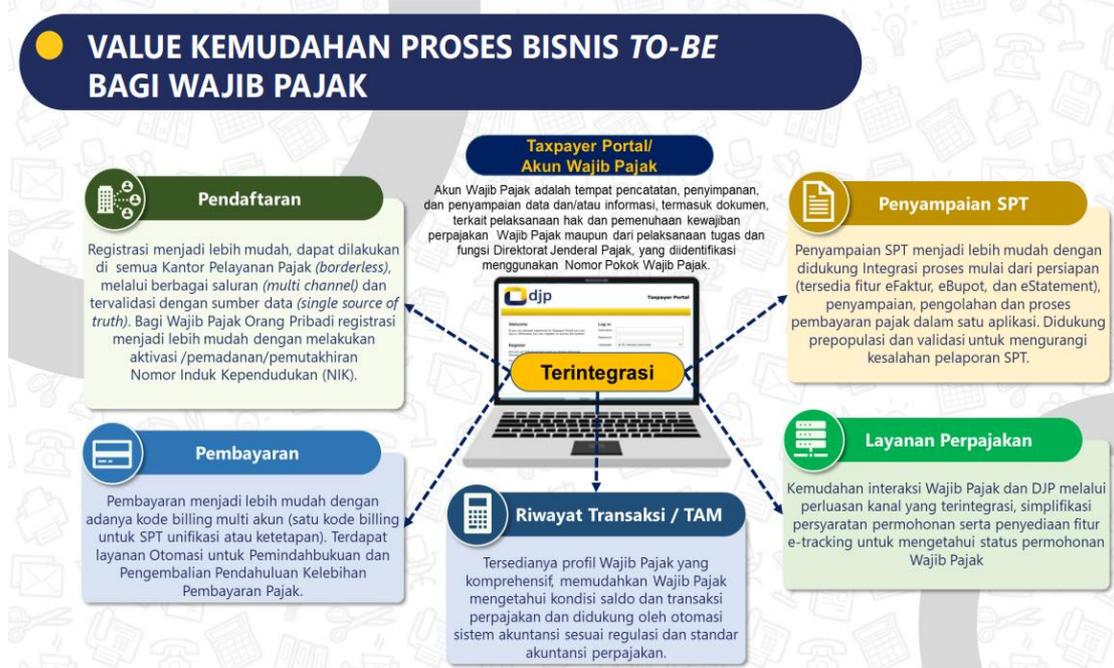
Neny Desriani  
Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1  
Gedungmeneng Bandar Lampung  
35145 Indonesia Email:  
neny.desriani@feb.unila.ac.id

**Abstrak :** Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pemadanan NIK-NPWP dan perhitungan PPH 21 Terbaru, menjadi inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Narasumber berasal dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kegiatan ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep pemadanan NIK-NPWP dan perhitungan PPH 21 terkini. Melalui platform Zoom Meeting, kegiatan ini memberikan E-Certificate sebagai bentuk apresiasi dan upaya peningkatan pemahaman perpajakan. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah 202 orang yang berasal dari berbagai institusi dan daerah, yang terdiri atas dosen, karyawan, mahasiswa dan umum. Secara keseluruhan, webinar ini berhasil mengupas tuntas pembaruan perpajakan awal tahun, membekali peserta dengan pengetahuan dan langkah-langkah konkret untuk beradaptasi dengan kebijakan baru

### PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia menjadi krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi (Yusuf, dkk., 2023). Melihat kompleksitas regulasi perpajakan, tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Lampung menggelar kegiatan Webinar dengan tema "Pemadanan NIK-NPWP dan Perhitungan PPH 21 Terbaru" sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, antara lain pemberlakuan pengajuan NIK-NPWP dan perubahan aturan PPH 21 (Tobing, 2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak telah resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024 Pemadanan NIK-NPWP ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, Upaya ini dilakukan ntuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Secara lebih lanjut, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan

Selain pemadanan NIK-NPWP, pemerintah juga telah melakukan perubahan aturan PPH 21 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam Rangka Hubungan Ikatan Kerja, Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial, dan Pemberian Lain yang Bersifat Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Perubahan aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan PPH 21 dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dapat dikatakan, pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajibannya dengan benar (Talip, 2022).



Gambar 1. Perubahan Proses Bisnis WP

Pengajuan NIK-NPWP bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Manik et al.). Perubahan aturan PPH 21 bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan PPN 21 dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Subagijo, 2023). Upaya tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat (Khozen and Setyowati, 2023). Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Lampung mengadakan kegiatan Webinar untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkini (Nugraeni and Saptono, 2023).

Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Kesimpulan kegiatan ini mencerminkan keberhasilan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peserta, sejalan dengan upaya meningkatkan pemahaman perpajakan di tengah dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang.



Gambar 2. Penyampaian Materi

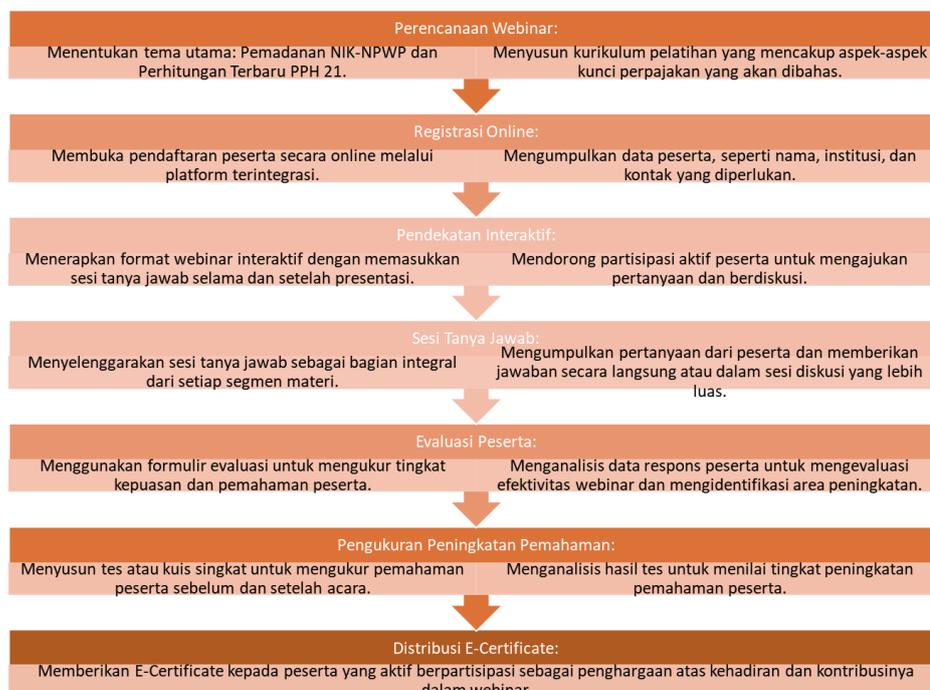
## METODE

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan cara melaksanakan pelatihan secara online dalam bentuk Webinar melalui platform Zoom Meeting. Peserta diundang untuk mendaftar secara online dan terlibat dalam sesi

tanya jawab interaktif. Data partisipasi dan respons peserta dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas webinar dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Penjelasan lebih rinci mengenai metode yang kami gunakan adalah sebagai berikut.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dirancang dengan pendekatan inovatif, memanfaatkan teknologi digital, dan dilakukan melalui serangkaian pelatihan online menggunakan platform Zoom Meeting. Metode ini dipilih dengan pertimbangan untuk mencapai jangkauan peserta yang luas dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam memahami konsep-konsep perpajakan terkini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah implementasi metode tersebut:

- a. Perencanaan Webinar:
  - Menentukan tema utama: Pemadanan NIK-NPWP dan Perhitungan Terbaru PPH 21.
  - Menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup aspek-aspek kunci perpajakan yang akan dibahas.
- b. Registrasi Online:
  - Membuka pendaftaran peserta secara online melalui platform terintegrasi.
  - Mengumpulkan data peserta, seperti nama, institusi, dan kontak yang diperlukan.
- c. Pendekatan Interaktif:
  - Menerapkan format webinar interaktif dengan memasukkan sesi tanya jawab selama dan setelah presentasi.
  - Mendorong partisipasi aktif peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi.
- d. Sesi Tanya Jawab:
  - Menyelenggarakan sesi tanya jawab sebagai bagian integral dari setiap segmen materi.
  - Mengumpulkan pertanyaan dari peserta dan memberikan jawaban secara langsung atau dalam sesi diskusi yang lebih luas.
- e. Evaluasi Peserta:
  - Menggunakan formulir evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman peserta.
  - Menganalisis data respons peserta untuk mengevaluasi efektivitas webinar dan mengidentifikasi area peningkatan.
- f. Pengukuran Peningkatan Pemahaman:
  - Menyusun tes atau kuis singkat untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah acara.
  - Menganalisis hasil tes untuk menilai tingkat peningkatan pemahaman peserta.
- g. Distribusi E-Certificate:
  - Memberikan E-Certificate kepada peserta yang aktif berpartisipasi sebagai penghargaan atas kehadiran dan kontribusinya dalam webinar.



Gambar 3. Metode kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran online yang interaktif, memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep-konsep perpajakan terkini. Dengan adanya metode ini, diharapkan

peserta tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan mencakup partisipasi aktif peserta dan peningkatan pemahaman terkait pemadanan NIK-NPWP serta perhitungan PPH 21. Diskusi antara narasumber dan peserta membahas konsep-konsep kunci, serta implikasi praktis dari perubahan peraturan perpajakan.

Hasil kegiatan webinar ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu partisipasi aktif peserta dan peningkatan pemahaman terkait pemadanan NIK-NPWP serta perhitungan PPH 21.

a. Partisipasi Aktif Peserta

Peserta webinar menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, baik melalui chat maupun sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah peserta webinar mencapai 202 orang. Dari jumlah tersebut, 90% peserta menyatakan puas dengan materi yang disampaikan. Peserta juga menyatakan bahwa webinar ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemadanan NIK-NPWP dan perhitungan PPH 21.

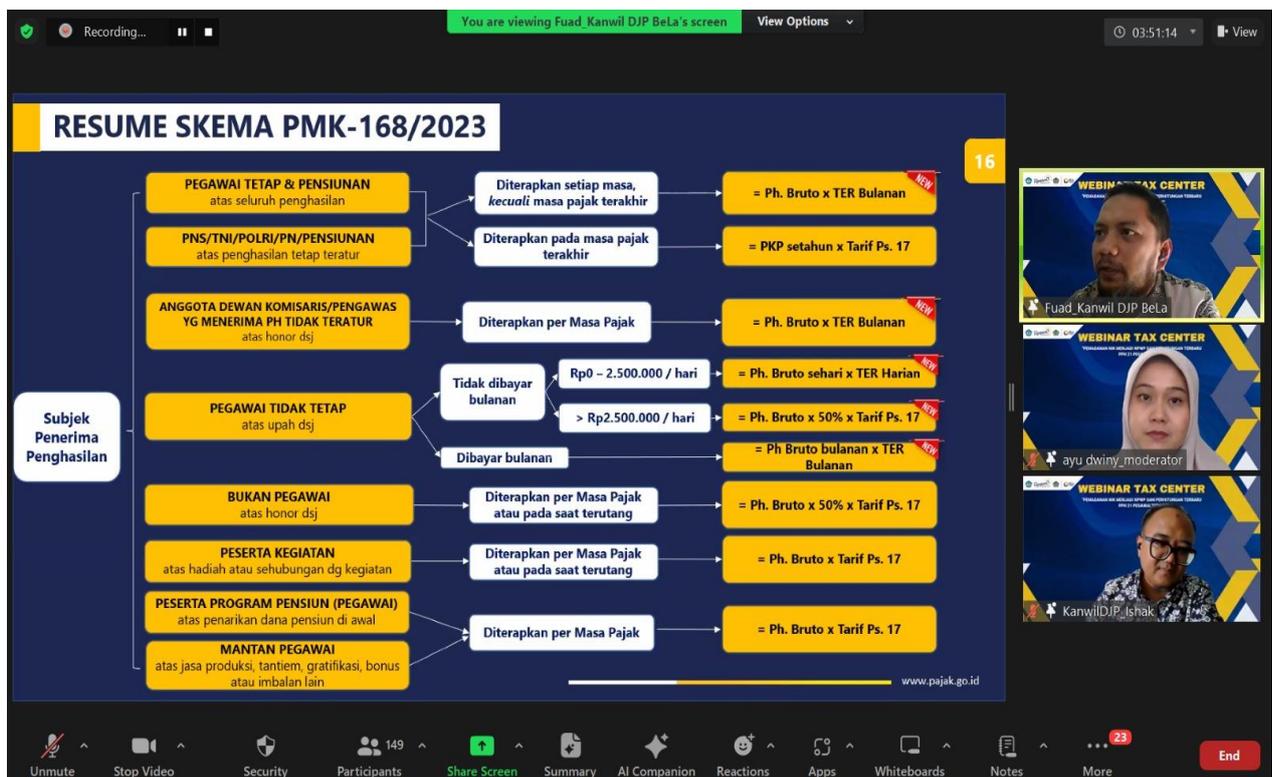
b. Peningkatan Pemahaman

Peningkatan pemahaman peserta dapat diukur melalui hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, 80% peserta menyatakan bahwa mereka dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Peserta juga menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka.

c. Diskusi dengan Narasumber

Diskusi antara narasumber dan peserta membahas konsep-konsep kunci, serta implikasi praktis dari perubahan peraturan perpajakan. Narasumber memberikan penjelasan yang komprehensif dan interaktif, sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik.

Hasil kegiatan webinar ini menunjukkan bahwa webinar ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Partisipasi aktif peserta dan peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta dan dapat dimengerti dengan baik. Diskusi yang terjadi antara narasumber dan peserta menunjukkan bahwa peserta aktif terlibat dan termotivasi untuk mempelajari materi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa webinar ini telah berhasil menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik.

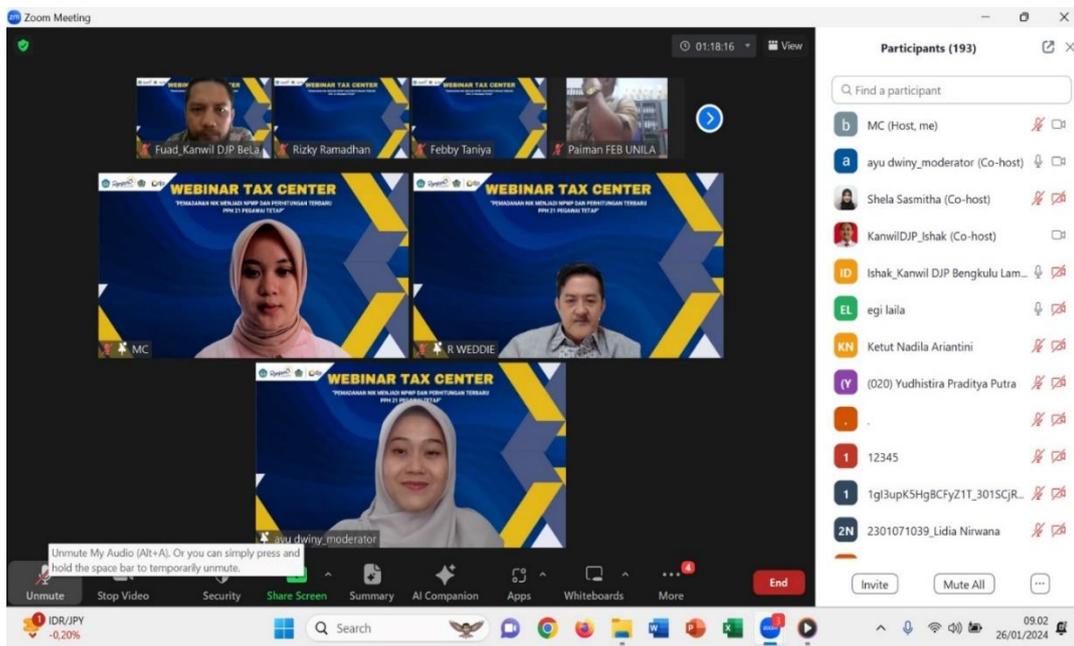


Gambar 4. Resume Skema Terbaru

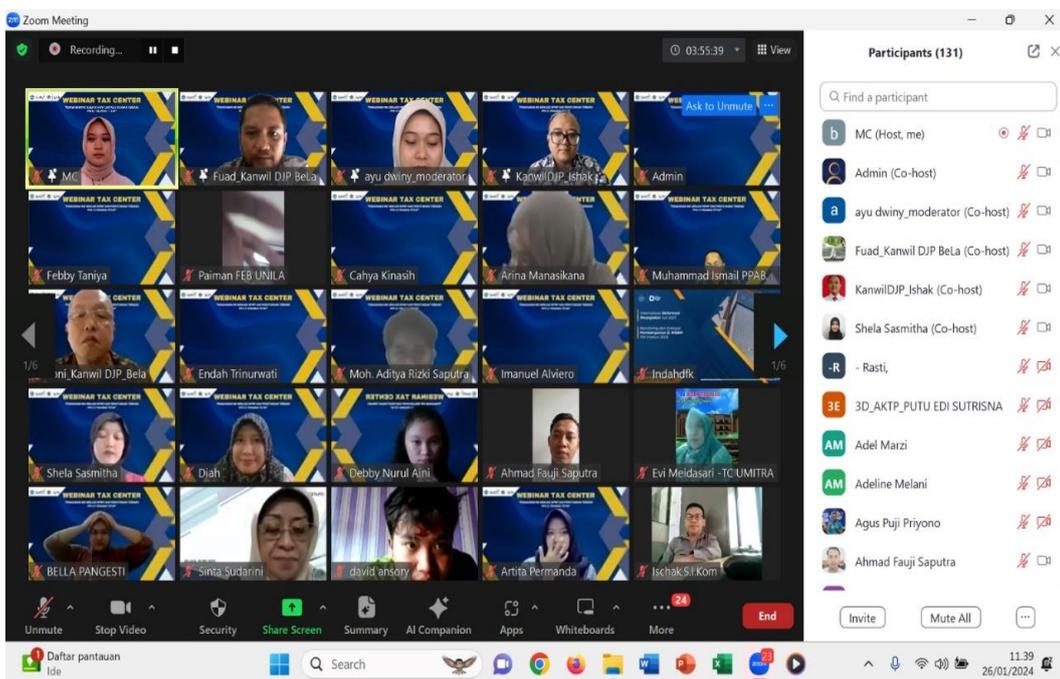
**KESIMPULAN**

Webinar ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih luas kepada peserta, mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak di tengah dinamika regulasi perpajakan. Keberhasilan acara ini tercermin dalam partisipasi aktif dan antusiasme peserta dalam memahami konsep-konsep perpajakan terbaru. Pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemadanan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk mempermudah administrasi perpajakan, seperti pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan pajak, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Pemadanan NIK sebagai NPWP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi DJP Online.

Selain itu, terdapat perubahan terbaru dalam perhitungan PPH 21 meliputi perubahan tarif PPH 21, perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan perubahan komponen pengurang penghasilan. Perubahan-perubahan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024. Webinar ini menekankan pentingnya pemadanan NIK-NPWP dan memahami skema PPH 21 terbaru untuk kepatuhan pajak yang optimal. Peserta disarankan memanfaatkan kalkulator PPH 21 terkini dan berkonsultasi dengan pihak pajak jika membutuhkan bimbingan. Secara keseluruhan, webinar ini berhasil mengupas tuntas pembaruan perpajakan awal tahun, membekali peserta dengan pengetahuan dan langkah-langkah konkret untuk beradaptasi dengan kebijakan baru.



**Gambar 5.** Dokumentasi Moderator, MC, Pemateri & Ketua Tax Center Unila



**Gambar 6.** Dokumentasi Peserta kegiatan

## REKOMENDASI

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan jumlah peserta webinar, diversifikasi materi webinar untuk mencakup berbagai topik perpajakan. pengembangan materi webinar yang lebih interaktif dan menarik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan Kegiatan ini yaitu seluruh peserta, DJP Kanwil Bengkulu Lampung, dan FEB Unila.

## REFERENSI

- Khozen, I. & Setyowati, M. S. 2023. Managing Taxpayer Compliance: Reflections On The Drivers Of Willingness To Pay Taxes In Times Of Crisis. *Cogent Business & Management*, 10, 2218176.
- Manik, I. I. D. A. M., Sastri, L. K. D. & Pertamawati, N. P. Intensification Of Taxation And Increasing Taxpayer Compliance Through The Voluntary Disclosure Program.
- Nugraeni, U. & Saptono, P. B. 2023. Analysis The Implementation Of Indonesian Supertax Deduction Incentive For Apprenticeship And Training Programs. *Interdisciplinary Social Studies*, 2, 2249-2267.
- Subagijo, K. P. 2023. The Effect Of Tax System Modernization On Taxpayer Compliance Based On Law In Indonesia. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2, 1215-1218.
- Talip, R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Tobing, E. G. L. 2022. Modernisasi Administrasi Perpajakan: Nik Menjadi Npwp. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6, 183-193.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zandrato, J. E. D. (2023). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16-21.